

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI RUMAH YANG DILAKUKAN DALAM
KEADAAN TERDESAK**

(Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara
Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

M. FIQRI ADIRA PRATAMA

NPM : 1521030234

Program Studi : Mu'amalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2019 M**

ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah pihak dengan syarat kerelaan. Jual beli dalam islam dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Di antaranya adalah subjek yang melakukan transaksi harus dengan kehendak atau keinginan sendiri tanpa adanya paksaan. Dalam akad jual beli harus berdasarkan kerelaan tanpa adanya unsur paksaan dan unsur ketidakjelasan karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini terdapat jual beli rumah yang dilakukan dalam keadaan Terdesak di Kelurahan Sumur Batu. Pihak penjual terpaksa menjual rumah milik orang tuanya di karenakan ancaman terhadap dirinya, ancaman tersebut datang dari pihak yang meminjamkan nya uang. Pihak yang meminjamkan uang mengancam akan menyita rumah pemilik hutang dan apabila pihak yang berhutang tersebut tidak bersedia maka akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian pihak yang berhutang menjual rumah milik orang tuanya dengan harga murah dan karena merasa rugi pihak penjual tidak rela dalam transaksi jual beli tersebut.

Rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah bagaimana praktik jual beli rumah yang dilakukan dalam keadaan terdesak di Kelurahan Sumur Batu dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rumah yang dilakukan dalam keadaan terdesak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapat dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli rumah tersebut di kota (Bandar Lampung). Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, sistematisasi data dan rekonstruksi data. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir induktif. Serta melalui pendekatan normative yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dianalisis maka jual beli rumah yang dilakukan dalam keadaan terdesak di Kelurahan Sumur Batu dalam praktiknya penjual melakukan transaksi dalam keadaan terdesak karena adanya ancaman dari pihak yang meminjamkan nya uang, merasa rugi atas penjualan rumah tersebut, pihak penjual tidak rela dalam transaksi tersebut. Menurut hukum Islam praktik jual beli rumah tersebut belum memenuhi syarat sah dalam subjek akad karena pihak penjual melakukan transaksi bukan karena keinginan sendiri. Maka praktik jual beli tersebut tidak sah berdasarkan hukum Islam. Dan jual beli tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang yaitu jual beli *Malja*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fiqri Adira Pratama

Npm : 1521030234

Jurusan/Prodi Studi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Rumah Yang Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak (Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 27 November 2019

Materai

M. Fiqri Adira Pratama

NPM.1521030234

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUÁL BELI RUMAH YANG DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERDESAK (Studi Kasus Kel. Sumur Batu Kec. TBU Bandar Lampung)**

Nama : **M. Fiqri Adira Pratama**

NPM : **1521030234**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

NIP. 196901051998031003

NIP. 197409202003121003

Ketua Prodi Muamalah

Khoirudin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rumah Yang Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak** (Studi Kasus Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung) Disusun oleh **M. Fiqri Adira Pratama**, Npm 1521030234, Jurusan Mu'amalah, Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari / Tanggal Senin, 30 Desember 2019 Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

TIM MUNAQSAH

Ketua : Gandhi Liyorsa Indra, M.Ag.

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H. M.M

Sekretaris : Muslim S.H.I M.H.I

Penguji I : Relit Nur Edi S.Ag. M.Kom.I

Penguji II : H. Rohmat S.Ag M.H.I

Buku Fakultas Syari'ah

Dr. Kh. Kheiruddin, M.H.

1910210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.An-Nisa {4} :29).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan telah menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

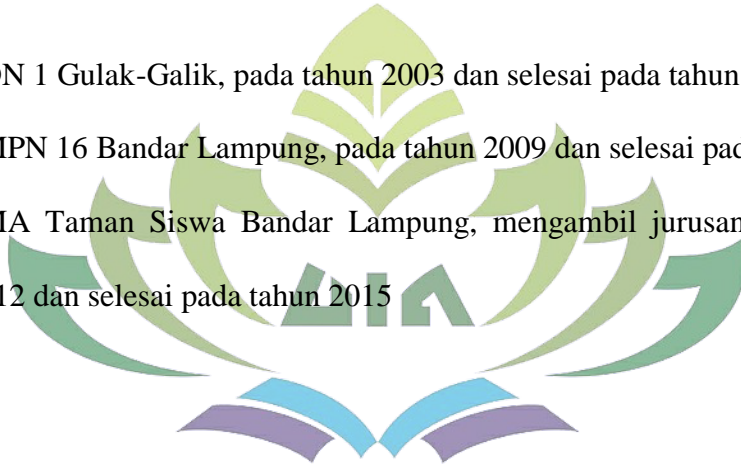
1. Kedua orang tuaku Bapak Hasanuddin dan Ibu Eva Rugaya yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang do'a dan motivasi Bapak dan Ibu yang selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Ku ucapkan terimakasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibu.
2. Adiku Safannah Zahra tersayang yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyemangat dalam hidupku.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studiku dengan baik.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap M.Fiqri Adira Pratama. Dilahirkan tanggal 26 Agustus 1997 di Teluk Betug Utara Kota Bandar Lampung. Mempunyai 1 saudara kandung yang bernama Safannah Zahra dan kedua orang tua yang bernama Hasanuddin dan Eva Rugaya

Mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. SDN 1 Gulak-Galik, pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009.
2. SMPN 16 Bandar Lampung, pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012.
3. SMA Taman Siswa Bandar Lampung, mengambil jurusan IPS pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan jasmani maupun rohani. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul. **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI RUMAH YAG DILAKUKAN DALAM KEADAAN TERDESAK** (Studi Kasus Kel. Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara) Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar di UIN Raden intan Lampung. Jika didalamnya dijumpai kebenarannya maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika didapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena tidak sengaja dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstuktif sangat diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah.
4. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M. Kom.I. Selaku pembimbing I, dan Bapak Rohmat, S.Ag., M.HI. Selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan.
6. Kedua Orangtuaku, Adikku dan teman-teman terimakasih atas do'a dan dukungannya. Semoga Allah Senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
7. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah angkatan 2015, sahabat-sahabat kelas MU B: Agung Tri Pratama, Rizki Rustandi, Rendi Karno, Tri Handoko, Bendri Rizqulloh, Marzha Dwi Syahroni, Ahmad Fauzan, Ja'far Sodiq, Andikha Mahensya, Romadoni Adi Saputra, Muhammad Andiansyah, Dila Martanti, Riska Anggraini, Nurul Amalia, Wiwit Ayu Ningsih, Anisa Rahmawati, Yosika, Anis Faizah, Ade Mareta, Bellah Dwi Putri, Yolan Melati, Yuli Sri Lestari, Siti Izah Khomariah, Siti Hanivah, Dini andiani, Juliana, Anisa Dian Miela Diena, Puspita Sari, Nur Tiara Sari, Yeyen, Purnama Lestari, Kautsar Septia Wulandari, Fitri Khasanah, Ayu Khodijah, Lugita Anggraini, Dessy Putri Ningsih, Yosa Adi Prasetya, Aldinayan Smil, Saiful Nugraha, dan

lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat yang kalian berikan.

8. Teman-teman KKN UIN Raden Intan Lampung Kelompok 48 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas persahabatan selama ini.
9. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019

Penyusun



M. Fiqri Adira Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENEGASAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun Jual Beli	21
4. Syarat Sah Jual Beli	23
5. Kiyar dalam Jual Beli.....	26
6. Macam-Macam Jual Beli	27
7. Jual Beli yang Dilarang.....	38
8. Etika dalam Jual Beli	40
9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	45
B. Hutang Piutang	
1. Pengertian Hutang Piutang	48
2. Dasar Hukum Hutang Piutang	50
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	52
4. Prinsip-Prinsip Hutang Piutang	54
5. Faktor Pendorong Melakukan Hutang.....	56
6. Dampak Negatif Positif Berhutang.....	58
C. Tinjauan Pustaka.....	61

BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN	
Praktik Jual Beli Yang Dilakukan Dalam Keadaan Terdesak di	
Masyarakat Kelurahan Sumur Batu Bandar Lampung	
.....	64
 BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Jual Beli Yang Dilakukan dalam Keadaan Terdesak di	
Kelurahan Sumur Batu Kec. Teluk Betung Utara Bandar	
Lampung	74
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli yang	
Dilakukan dalam Keadaan Terancam	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Rekomendasi	81
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan berniaga, perdagangan atau jual beli. Untuk usaha tersebut dibutuhkan adanya timbal balik di antara penjual dan pembeli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.¹

Jual beli merupakan pelepasan hak milik dengan adanya ganti rugi seperti uang, barang, atau juga dengan jasa, atau memindahkan hak kepemilikan demi mendapatkan imbalan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139

adalah penukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang pas).²

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli dapat terjadi dengan dua cara, dalam cara pertama pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud harta di sini adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sedangkan cara yang kedua yang memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang dengan mata uang rupiah atau dengan mata uang lainnya.³

Perdagangan atau jual beli berasal dari kata باع (*baa'a*). Jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain).⁴ Sedangkan menurut etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁵

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *at-tijârah*, *al-mubâdalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman:

² *Ibid.* h. 140

³ Lina Oktasari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya". (Skripsi Program Studi Mu'amalah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018), h. 29

⁴ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan...., h. 75

⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ (ال فاطر ٢٩)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”. (QS. Al-Faathir (35) : 29)

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.⁶

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula

⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi....., h. 128

kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas atau bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁷

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mâl*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighâh ijâb qabûl*).⁸

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁹

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹⁰

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), h. 69-70

⁸Ismail Nawawi, *Fikih....*, h. 75.

⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi....*, h. 139

¹⁰R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1

- a. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara'.
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu dengan yang lain atas dasar merelakan.
- c. Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
- d. Penukaran benda dengan benda yang lainnya dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya pengantiannya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *Ijab* dan *Iqabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).¹²

¹¹Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143

¹²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu dari kategori muamalah yang mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma para ulama.¹³

a. *Al-Qur'an*, diantaranya:

Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang utama. Oleh karena itu dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁴ Dalam Al-Qur'an terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, yang di antaranya ialah :

- 1) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.... (البقرة ٢)

Artinya : “Allah telah menghalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

- 2) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' (4) : 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.... (النساء ٤)

Artinya : “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.¹⁵

b. *As-Sunah*, di antaranya:

As-Sunahh adalah sumber hukum islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.¹⁶ Dalam As-Sunnah terdapat aturan yang mengatur jual beli, antara lain ialah :

¹³Imam Mustofa, *Fiqih*..., h. 22.

¹⁴Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *FiqihIbadah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),h.103.

¹⁵*Ibid.*, h.83.

¹⁶Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*...h.111

- 1) Dalam Hadist Rasulullah SAW bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ¹⁷ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : *Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.*”(HR. Tarmizi)

- 2) Hadist Rasulullah dari Abi Said al-Khudri yang diriwayatkan oleh at-Tarmizi :

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ¹⁸ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : “*Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatannya disurga) dengan para Nabi, para sidiqin, dan para Syuhada*”.(HR. Tarmizi)

c. **Ijma'**

Ijma adalah kesepakatan semua dari kalangan mujtahid diantara umat islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. berdasarkan hukum syar'i tentang suatu kasus yang terjadi.¹⁹ Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah *fiqh* yang dikemukakan oleh Madzhab Syafi'I yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَأْ حَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹⁷ Al-tarmizi, sunnah Al-Tarmidzi, juz 3, maktabah kutub (Al-mutun) ,h.5/5.

¹⁸ *Ibid.*, h,515.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung :CV. Pustaka Setia, 2010). Hal.69

Artinya : “*Hukum yang pokok dari segala sesuatu (muamalah) adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.*”²⁰

Maksud dalam kaidah di atas yaitu bahwa setiap masalah dalam muamalah pada asalnya hukumnya diperbolehkan, sampai ditemukan ada dalil yang kuat dan pasti menunjukkan adanya larangan dalam bermuamalah. Maka sesuatu hal yang menjadi terlarang setelah adanya ketentuan yang menetapkan larangan pada sesuatu itu maka hukumnya haram.²¹

3. Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadikan rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.²²

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli

²⁰Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh), Cet Ke-2, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.25.

²¹Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015), h. 183

²²Nasrun Haroen, *Fiqih.....*, h. 114-115

adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut hukum Islam.²³ Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:²⁴

- a. *Al-‘aqidani* atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
 - 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya.
 - 2) Pembeli, yaitu pemilik harta yang membeli barang.
- b. *Mauqud ‘alaih*, atau obyek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang dijualbelikan.
- c. *Sighat*, atau lafazd akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Sedangkan para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁵

²³M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 81

²⁴Abdurrahman Aljaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Pers, 2001), h. 16

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 102

4. Syarat Sah Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Berbagai upaya mereka lakukan tanpa memperhatikan syariat demi untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda bahkan ada yang melakukan kecurangan demi memperlancar transaksi jual beli, padahal pada hakikatnya transaksi yang mereka lakukan adalah transaksi ribawi. Dalam hukum Islam terdapat tiga macam syarat dalam jual beli yaitu:

a. Syarat Umum

Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu teridakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudaratn, dan persyaratan-persyaratan yang dapat merusak lainnya.²⁶

b. Syarat Khusus

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi syarat:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang.
- 2) Harga awal harus diketahui.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.

²⁶Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai dan Praktik Dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 146

- 4) Barang yang diperjualbelikan menjadi tanggung jawabnya penjual.
- 5) Dengan keinginan sendiri (tidak adanya paksaan), dalam artian bahwa apabila melakukan transaksi jual beli terdapat salah satu pihak yang tidak melakukan suatu paksaan atau desakan kepada pihak lain, Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar keinginan sendiri hukumnya tidak sah.²⁷

c. Syarat *Lujum* (Kemestian)

Akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari “*khiyar*” (pilihan) yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.²⁸ Dalam buku Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. Syarat-syarat bagi sahnya suatu *bai'*, yaitu:

- 1) Syarat Kecakapan Para Pihak.
- 2) Kesempatan Para Pihak.
- 3) Penawaran dan Penerimaan.
- 4) Isi Penerimaan dan Penawaran.
- 5) Kepemilikan Barang.
- 6) Spesifikasi Barang.
- 7) Indikasi Barang.
- 8) Eksistensi Barang.
- 9) Pemindahtanganan.
- 10) Penguasaan Barang Oleh Penjual.
- 11) Kehalalan Barang.

²⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata.....*, h.105

²⁸ *Ibid.*, h.123.

12) Penyerahan Barang.

13) Harga Barang.

14) Jual Beli Bersyarat.²⁹

Adapun dasar yang dijadikan prinsip dalam mu'amalah kehartabendaan, ada dua hal, yaitu:

- a) Melarang memakan makanan yang batil.
- b) Saling merelakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاء ٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' (4) : 29)

Ayat tersebut memberikan isyarat, bahwa perniagaan diperbolehkan dalam mu'amalah yang islami adalah perniagaan yang dapat memperoleh keuntungan disamping juga bisa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, perniagaan yang tidak bisa menimbulkan kerugian, tidak dapat disebut perdagangan, sehingga tidak diperbolehkan melakukan riba.³⁰

²⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 185

³⁰Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 129.

Secara garis besar syarat jual beli dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-In 'iqad*). Syarat sahnya akad (*Syuruth al-Shihhah*), syarat rrlaksananya akad (*Syuruth al-Nafazd*) dan syarat berlakunya akibat hukum (*Syuruth al-Luzum*).³¹ Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat penipuan) dan lain sebagainya.³² Dan ini penjelasan syarat-syarat tersebut secara rinci.

5. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam yaitu :

a. *Khiyar majelis*

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual

³¹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 19.

³²Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqih al-Syafi'i*....., h. 448

rumah ini dengan harga Rp100.000.000,00 dengan khiar selama tiga hari.

c. *Khiyar 'aib*

Artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti Aisyah r.a bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.³³

6. Macam-Macam Jual Beli

Dalam macam-macam jual beli terdapat beberapa klasifikasi yang ditinjau menurut segi nya antara lain :

a. Ditinjau dari segi hukumnya

a. Jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam

Suatu jual beli dapat dikatakan sebagai jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam ketika dalam jual beli itu sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat yang sudah ditentukan oleh syara', benda bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada *khiyar* lagi. Contohnya, seorang yang membeli sebuah Laptop. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Pada Laptop itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak

³³Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*,h.84

adanya kecacatan dalam objek, tidak ada yang rusak, dan tidak terjadi kecurangan harga dan harga laptop itu pun telah diserahkan, serta tidak adanya lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Hukum Jual beli seperti ini menurut hukum Islam dikatakan jual beli yang diperbolehkan.³⁴

b. Jual beli yang dilarang dalam hukum Islam

a) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari subjek akad yaitu penjual dan pembeli, antara lain:

(1) Jual beli anak kecil

Jual beli anak kecil maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, terkecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan.

(2) Jual beli orang gila

Jual beli orang gila maksudnya ialah bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila hukumnya tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mengalami mabuk juga dianggap tidak sah, karena ia tidak berakal.

(3) Jual beli orang buta

Jual beli orang yang buta menurut Jumhur Ulama menyepakati bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya hukumnya tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan mana barang yang baik

³⁴Nasroen Haroen., *Fiqih Muamalah*....,h.121

dan mana barang yang buruk, bahkan pendapat ulama Syafi'iyah walaupun telah diterangkan sifatnya tetap hukumnya tidak sah.

(4) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Artinya bahwa dalam jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang karena ia sakit ataupun karena kebodohnya hukumnya tidak sah, sebab ia dianggap tidak memiliki kepandaian atau kecerdasan dan ucapannya dianggap tidak dapat dipastikan.

(5) Jual beli *Fudhul*

Jual beli *Fudhul* ialah transaksi jual beli milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

(6) Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami suatu bahaya bagi dirinya. Jual beli seperti ini menurut para ulama hukumnya tidak sah, karena dipandang tidak lazim karena tidak seperti jual beli yang terjadi pada umumnya.³⁵

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya).

³⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam....*,h.112

Oleh karena itu keabsahan ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Sedangkan menurut ukama Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridhoan ketika akad. Karena masing-masing aqid harus saling meridhai yaitu tidak ada unsur paksaan. Ulama Hanabilah menghukumi makruh bagi orang yang menjual barangnya karena terpaksa atau karena kebutuhan yang mendesak dengan harga di luar harga umum.

b) Jual beli yang dilarang berdasarkan klasifikasi dari objek jual beli (benda yang diperjualbelikan), antara lain ialah :

(1) Jual beli barang atau benda yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di dalam air tidak berdasarkan ketentuan syara'.

(2) Jual beli benda yang tidak ada atau nampak atau dikhawatirkan tidak ada

Dalam jual beli benda yang tidak ada Jumhur ulama menyepakati bahwa memperjualbelikan barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada secara hukum tidak sah.

(3) *Al-bai Gharar*

Gharar menurut bahasa berarti tipuan, keraguan, atau suatu tindakan yang bermaksud untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, tidak adanya kepastian baik sesuatu itu ada atau tidak adanya obyek pada suatu akad, dalam besar kecilnya jumlah maupun dalam menyerahkan obyek akad tersebut.³⁶ *Gharar* dalam bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.³⁷

Para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam mengemukakan sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan, bahwa *gharar* ialah suatu obyek akad yang tidak dapat diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi atau kambing yang sedang lepas.

³⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147.

³⁷Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T Berkas Mulia Insani, 2018), h. 240

Menurut Ibnu Hazam berpendapat bahwa *gharar* dilihat dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad terhadap apa yang menjadi akad tersebut.³⁸ Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* yaitu suatu akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas, apakah pada efek akad itu terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini selaras dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad.

Dari beberapa definisi dapat di ambil pengertian bahwa *gharar* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukuran nya, atau karena tidak mungkin dapat diarah-terimakan.³⁹ Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di

³⁸M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab....*,h.147-148

³⁹Ghufron A. Mas'Adi,*Fiqh Muamalah Konstektual*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),h.133

transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.⁴⁰

Ibn Jazi Al-Maliki berpendapat, bahwa *gharar* yang diharamkan ada sepuluh jenis, antara lain:

- a) Tidak diketahuinya masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika jadi datang.”
- b) Tidak diketahuinya harga dan barang.
- c) Tidak diketahuinya ukuran barang dan harga.
- d) Tidak diketahuinya sifat barang dan harga.
- e) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- f) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g) Menghargakan dua kali dalam 1 barang.

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan

⁴⁰Efa Rodah Nur, “Riba dan *Gharar*: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern”, *Al-Adalah*, Vol.XII, No.3, Juni 2015, h.657.

diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur *gharar*.⁴¹

Gharar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar* itu hukumnya tidak boleh.

(4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak digunakan untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

(5) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya apabila disebutkan sifat-sifat dan mensyaratkan 5 (lima) macam, antara lain:

⁴¹Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*....,h.256

- a) Harus jauh sekali tempatnya.
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- d) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
- e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

(6) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, menurut Ulama Malikiyah melarang atas makanan, menurut ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak.⁴²

(7) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma binatang maksudnya seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunanyang baik, hukumnya adalah haram.

(8) Jual beli *Majhul*

Jual beli *Majhul* adalah jual beli barang atau benda yang tidak jelas, misalnya jual beli ubi yang masih di dalam tanah, dan jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah

⁴²Rachmat Syafe'i, *Fiqih*...., h.99.

karena akan mendatangkan perselisihan di antara manusia.⁴³

(9) Jual beli dengan *Muhaqallah*

Muhaqallah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud dari jual beli *Muhaqallah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah atau di kebun. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

(10) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *Mukhadharah* yaitu menjual buah-buahan yang belupantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mengga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.⁴⁴

c) Jual beli yang dilarang dari segi shigat (ijab qabul)

(1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) mengenai dengan barang maupun harganya namun tidak memakai ijab dan kabul. jual beli seperti ini hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.

⁴³Khumedi Ja'far, *Hukum...*, h.113-116

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h.79

(2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Artinya bahwa jual beli yang dilakukan tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka hukumnya tidak sah, karena ada kemungkinan dari pihak penjual untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas suatu barang.

(3) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini di dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

(4) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengancara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), Karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.⁴⁵

⁴⁵Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata*,h. 116-118.

(5) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh seseorang berkata: Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

(6) Jual beli *najasyi*

jual beli yang dilakukan seseorang dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.

(7) Menjual di atas penjualan orang lain

Dalam pelaksanaannya ialah dalam menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.

7. Jual Beli Yang Dilarang

Secara umum, *ma'qud 'alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat

diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.⁴⁶

Dalam buku Prof. Dr. H. Zainuddin Ali. M. A. tentang Hukum Perdata di Indonesia. Muhammad Rasulullah Saw. melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai akibat transaksi jual beli.⁴⁷ Hal ini diungkapkan beberapa contoh jual beli yang dilarang, sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang dibeli sebelum diterima barangnya.
- b. Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain.
- c. Membeli dengan menaikkan harga barang, padahal tidak bermaksud untuk membelinya.
- d. Memperjualbelikan barang haram dan najis.
- e. Jual beli *Gharar* (yang terdapat unsur penipuan di dalamnya).
- f. Dua bentuk transaksi pada satu barang atau harta.
- g. Membeli sesuatu barang atau harta kepada seseorang yang sedang menuju ke pasar.
- h. Jual beli *Ijon* adalah jual beli barang yang belum layak diperjualbelikan.⁴⁸

⁴⁶Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis....*, h. 154

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 146-147

⁴⁸*Ibid.*, h. 148-149

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, disini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: (1) Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain; (2) Menyempitkan gerakan pasar; (3) Merusak ketentraman umum.⁴⁹

1. Membeli barang harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.
3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.⁵⁰

8. Etika dalam Jual Beli

Rasulullah saw. telah menganjurkan untuk melakukan perniagaan, berdagang atau jual beli, berdagang merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam ajaran Islam bahkan melalui perdagangan itu sendiri pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka.

Salah satu dari beberapa bagian penting jual beli dalam Islam adalah etika berbisnis atau etika berjual beli. Pengertian etika adalah *a code or*

⁴⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 284

⁵⁰*Ibid.*, h. 285

set of principles which people live (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia).⁵¹ Etika sendiri di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).⁵² Dengan demikian, definisi moral dan etika itu berbeda. Norma merupakan suatu nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika merupakan cerminan kritis dan penjelasan rasional mengapa suatu itu baik dan buruk.

Di Indonesia sendiri pun permasalahan etika bisnis ini banyak yang mengabaikannya baik itu dari pebisnis menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Para pebisnis yang banyak mengabaikan etika dalam berbisnis karena hal tersebut dapat mempersempit ruang gerak mereka dalam mencari keuntungan ekonomis. Padahal, mencari keuntungan sebesar-besarnya merupakan salah satu prinsip dari ekonomi.

Sistem ekonomi Islam sendiri berangkat dari kesadaran etika, sedangkan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak terlalu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Ekonomi kapitalis berangkat dari kepentingan diri sendiri sedangkan sosialis dari kepentingan kolektif.

⁵¹ Veithzal Rivai, et. al. *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) h. 32.

⁵² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 357

Islam sendiri telah memperingatkan tentang tata cara berbisnis yang baik atau beretika, salah satunya pada firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء ٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*
(Q.S. An-nisa (4) : 29)⁵³

Bagi kita orang awam yang tidak terlalu mengerti tafsir al-Qur'an sendiri pun sudah bisa memaknai apa maksud dari kata batil dalam surat an-Nisa ayat 29 tersebut di atas. Di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri kata batil berarti sia-sia atau tidak benar, dari sini kita bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk melakukan bisnis dengan cara yang tidak benar yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam.

Rasulullah saw. sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis berikut ini adalah uraiannya.⁵⁴

Pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran

⁵³ Mushaf Ash-Shahib, *Terjemahan...*, h. 77.

⁵⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Business*, h. 86

dalam aktivitas bisnis. Rasulullah saw. sendiri bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang baru di bagian atas.

Kedua, kesadaran tentang arti sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagaimana implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung materiil semata, tetapi disadari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

Ketiga, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar benar diutamakan. Firman Allah swt. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (المطففي ١- ٣)

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*⁵⁵

Keempat, membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.

⁵⁵ Mushaf Ash-Shahib, *Terjemhan...*, h. 587

Kelima, tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoly. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara, beserta tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

Keenam, tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya (*mudharat*) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, karena dapat mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.

Ketujuh, komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dan sebagainya.

Kedelapan, bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ (البقرة ٨٧٢)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁵⁶

Jika menelusuri sejarah dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomis. Nabi Muhammad saw. adalah seorang pedagang, dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui para pedagang muslim. Dalam al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara halal. Dengan demikian, pelaku dan pemakan riba dinilai Allah swt. Sebagai orang yang kesetanan, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (البقرة ٥٧٢)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...” (QS. Al-Baqarah : (2) : 275)

9. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak orang lain.

⁵⁶ Ibid, h. 47

- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli dapat mendapat rahmat dari Allah swt.⁵⁷

b. Hikmah Jual Beli

Allah swt mansyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari saling tukar, dimana seorang memberi apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing.⁵⁸

⁵⁷Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah....*, h. 287

⁵⁸*Ibid.*, h. 288

Menurut Dr. H. A.Khumedi Ja'far, S.Ag.,M.H. Dalam buku hukum perdata di Indonesia, manfaat dan hikmah jual beli yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

- 1) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- 3) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁵⁹

Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat berkaitan dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Dapat diartikan bahwa hikmah diperbolehkan jual beli adalah menghindari manusia dari kesulitan bermu'amalah.⁶⁰

⁵⁹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata*..., h. 121-122

⁶⁰Sudarto, *Ilmu Fiqih*..., h. 256

B. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang (*al-Qardhu*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya.⁶¹ Menurut bahasa *al-Qradhu* ialah potongan, sedang menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.

Wahbah Zuhaili Az-Zuhaili mendefinisikan *qardh* menurut bahasa adalah *al-qath* yang berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur).⁶²

Mazhab-mazhab lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk dari pemberian harta atau benda lainnya melalui seorang kreditur kepada seorang debitur yang nantinya akan diganti dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya debitur, harta tersebut dapat berupa harta *mitsliyat*, hewan dan barang dagangan.⁶³

Adapun yang dimaksud hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya tersebut.⁶⁴ Kata sesuatu yang dimaksud oleh definisi ini adalah mempunyai makna yang luas, dalam arti dapat berbentuk uang atau

⁶¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 177.

⁶²Wahbah Zuhaili az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz. 5 terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 373.

⁶³*Ibid.*, h. 374

⁶⁴Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 136.

barang yang selama barang tersebut habis dalam pemakaian. Jelasnya *qardh* atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hutang piutang, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, Antara lain :

- a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan

Dalilnya firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”* (QS.Al-Baqarah:(2) : 282)

- b. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan pada saat awal hutang terjadi.
- c. Hendaknya hutang piutang dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- d. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila pihak yang berhutang tidak mampu

mengembalikannya, maka pihak yang berpiutang hendaknya memberi keringan.

- e. Pihak yang berhutang apabila sudah mampu membayar hutang tersebut, hendaknya dipercepat pembayarannya karena lalai dalam membayar hutang berarti berbuat zalim.⁶⁵

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa. Sebagaimana yang menjadi dasar hukum hutang piutang dapat ditemui dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalam ketentuan al-Qur'an dapat ditemui anjuran Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.⁶⁶

Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..... h. 98.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka* (Banten: PT Kalim, 2012), h. 540.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 245)

Disebutkan juga dalam dalam beberapa surat seperti surat Al-Baqarah ayat 280, Al-Baqarah ayat 282, Al-Baqarah ayat 283, dan At-Taubah ayat 60. Berikut bunyi surat-surat tersebut:

Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 280)

Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 282)

3. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

a. Syarat-syarat utang adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya pinjaman (*al-Qardhu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. Agar diketahui dengan jelas pengembalian dan tidak ada *gharar* (ketidakjelasan).
- 2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk harta *mitsli*. Namun, jumhur ulama membolehkan dengan harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan, seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
- 3) Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

b. Sementara rukunnya adalah sebagai berikut :

1. Pemilik barang yang dihutang (*muqridh*)

Menurut hal ini orang yang memberi hutang disyaratkan harus cakap dalam melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal), serta atas kehendak sendiri. Dengan adanya syarat baligh dan berakal, berarti anak kecil tidak memenuhi syarat untuk berhutang, karena anak kecil belum baligh. Meskipun demikian, terdapat perinciannya:⁶⁷

- a) Jika anak kecil belum *tamyiz* (bisa membedakan baik dan buruk), utangnya tidak sah secara mutlak.

⁶⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Fikih Muamalah "Taubat Dari Hutang Riba Dan Solusinya"* (Yogyakarta: CV Rumaysho, 2017), h. 107.

b) Jika anak kecil sudah *tamyiz*, dia boleh melakukan transaksi berhutang namun untuk jumlah yang sedikit.

2. Peminjam hutang (*muqtaridh*)

Menurut hal ini orang yang berutang atau yang mendapat pinjaman barang diisyaratkan harus cakap dalam melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal).

3. Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, Sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan. Barang yang dipinjamkan haruslah barang pemilik orang yang memberi pinjaman, berarti orang yang bukan pemilik harta atau barang yang dipinjamkan tidak memenuhi syarat untuk berhutang. Jika ada orang yang ingin memberikan pinjaman dengan menggunakan harta orang lain, harus mendapat izin dari pemilik harta terlebih dahulu.⁶⁸

4. Serah terima (ijab qabul)

Ijab qabul yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dibolehkan apabila dalam akad *qardh* terdapat kesepakatan guna mempertegas hak milik, seperti syarat adanya barang jaminan, saksi, bukti tertulis atau pengkauan dihadapan hakim.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 108.

4. Prinsip- Prinsip Hutang Piutang

- a. Islam hanya mengenal adanya *qardh hasanah* (hutang kebajikan).

Hutang boleh berbentuk apa saja yakni uang atau barang, besar maupun kecil. Untuk keperluan pribadi maupun bisnis, tetapi hutang itu hanya boleh diberikan tanpa bunga. Karena bunga telah dilarang dalam Islam maka ia tidak boleh dipungut dari hutang dalam bentuk apapun juga.⁶⁹

- b. Tidak dibenarkan adanya hutang kecuali keadaan mendesak.

Berhutang dengan tujuan memenuhi kehidupan mewah dan boros, tidak diperbolehkan. Hanyalah boleh hutang itu diberikan jika orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

- c. Karena perjanjian verbal mengenai hutang dapat menimbulkan

perselisihan, penipuan, dan masalah hukum, maka kitab suci Islam mewajibkan kedua belah pihak, *muqtaridh* maupun *muqridh*, melakukan kontrak hutang dengan tertulis dipersaksikan oleh dua orang saksi serta menetapkan syarat dan ketentuan pelunasannya. Penulis haruslah menulis sesuai dengan yang didiktekan oleh *muqtaridh* dan jika *muqridh* lemah akal atau di bawah umur, dibantu oleh walinya. Jika hutang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ditemukan seorang penulis perjanjian, maka *muqridh* harus memberi jaminan dari hartanya kepada *muqtaridh*. Baik penulis maupun saksi wajib berlaku jujur dalam menulis maupun dalam memberi bukti,

⁶⁹ Muhammad Sharif Chaudry, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group 2016), h. 245

sedangkan *muqtaridh* dan *muqridh* pun haram saling merugikan dengan cara apapun juga.

- d. Pemberi pinjaman hutang atau *muqridh* boleh meminta jaminan dalam bentuk asset ataupun harta dari *muqtaridh* sebagai jaminan pelunasan hutang. Secara teknis yang disebut gadai "*Rahn*".⁷⁰ Namun, dalam hutang piutang dilarang mencari keuntungan dari harta yang dihutangkan.
- e. Pelunasan hutang adalah hal yang menjadi prioritas sebelum harta apabila orang yang meninggal akan membagi hartanya kepada para ahli waris.
- f. Pelunasan hutang yang melebihi jumlah termasuk halal, selama tidak diperjanjikan diawal dan atas keikhlasan dari *muqtaridh*.
- g. Hutang haruslah dilakukan dengan niat akan membayarnya.
- h. *Muqridh* berhak menggunakan kata-kata yang keras kepada *muqtaridh* yang tidak mengembalikan hutangnya. Bahkan *muqtaridh* dapat dipenjara oleh pengadilan karena tidak membayar hutangnya ketika upaya *muqridh* sudah gagal dalam menagih hutang tersebut.
- i. Jika seorang *muqtaridh* dalam keadaan susah dan serba kekurangan maka *muqridh* hendaklah menunda penagihannya hingga posisi finansial *muqtaridh* memungkinkan untuk mengembalikan hutangnya.
- j. Seorang *muqtaridh* berhak menerima zakat untuk meringankan beban hutangnya. Negara Islam wajib menolong *mustaqridh* dengan

⁷⁰*Ibid*, h. 247.

penerimaan zakatnya, karena membebaskan *muqtaridh* dari kewajiban hutangnya adalah salah satu sebab ditetapkan Al-Qur'an bagi pengumpulan zakat.

5. Faktor Pendorong Melakukan Hutang

Pada dasarnya tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya, tidak seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Demikianlah sebagaimana keadaan manusia yang Allah tetapkan, ada yang dilapangkan hartanya hingga melimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dan mendorongnya untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu membantunya.

Menurut ajaran Islam hutang piutang adalah muamalah yang dibolehkan. Tapi diharuskan ekstra hati-hati dalam menerapkannya, hutang dapat menimbulkan suatu kewajiban yaitu kewajiban membayar. Secara umum interpretasi terhadap terjadinya hutang cenderung pada konsep ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor seseorang melakukan hutang piutang, antara lain :

- a. Keadaan ekonomi yang memaksa seseorang untuk berhutang

Pada dasarnya hukum hutang piutang dalam Islam adalah boleh terutama dalam keadaan ekonomi yang darurat. Meskipun agama tidak

melarang transaksi hutang namun hutang telah menjadi pilihan perilaku ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁷¹

b. Kebiasaan berhutang

Perilaku berhutang dapat diukur melalui intensi atau niat seseorang terhadap keputusan berhutang dan sikap merupakan salah satu alasan yang penting dalam berniat melakukan suatu hal termasuk berhutang.⁷²

Kebiasaan berhutang, meski tidak dalam keadaan darurat justru akan memberikan dampak buruk terutama jika hutang tersebut tidak sempat untuk dilunasi karena yang berhutang lebih dulu meninggal dunia.

c. Memiliki rasa ingin menikmati kemewahan yang belum bisa dicapai

Berhutang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nomor tiga yaitu papan sangatlah kurang dianjurkan. Karena tak ada alasan yang membenarkan untuk berhutang karena tujuan yang haram atau bermewah-mewah.

d. Hutang merupakan alternatif terakhir

Ketika segala usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai namun tetap mengalami kebuntuan.

Keterbatasan seperti inilah yang dibolehkan memilih jalan berhutang.⁷³

⁷¹Muhammad Shohib, "Sikap Terhadap Uang dan Perilaku Berhutang", *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 03 No. 01 (Januari 2015), h. 133. Diakses 01 November 2018 Pukul 11:16 WIB.

⁷²*Ibid*, h. 136.

⁷³Abdul Aziz Ramdanyah, Esensi Utang dalam Konsep ekonomi Islam, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 1 (Juni 2016), h. 133. Diakses 16 November 2018 Pukul 18:41 WIB.

e. Gaya hidup yang harus dipenuhi

Ketika pendapatan dan status ekonomi yang rendah membuat hutang menjadi alternatif atau pilihan bagi masyarakat umumnya. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa berhutang adalah sebuah beban tetapi tidak sedikit orang yang memaknai hutang sebagai motivasi untuk mencari rupiah dalam pekerjaannya. Sehingga hutang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus.

f. Faktor terbesar seseorang melakukan hutang piutang merupakan faktor ekonomi

Terdapat alasan lain yang menyebabkan terjadinya hutang piutang yaitu karena adanya dorongan dari diri pribadi untuk mengedepankan keinginannya tersebut. Keinginan tersebut tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan tetapi juga gengsi dan sosialisasi, yang pada akhirnya hanya sebagai faktor kepuasan semata dan hanya digunakan sebagai suatu kesenangan sehingga dilakukan berulang.

6. Dampak Negatif Dan Positif Hutang Piutang

Prilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Prilaku berhutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Pada dasarnya hutang piutang memiliki berbagai dampak seperti negatif dan positif, berikut dampaknya:

a. Dampak positif

- 1) Hutang piutang sebagai bentuk tolong-menolong, dalam Islam tolong menolong tentu dibolehkan dan hukumnya mubah. Dengan niat tolong-menolong maka orang yang memberi hutang sudah mempermudah segala urusan orang yang berhutang.
- 2) Mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah, apabila niat memberi hutang piutang tersebut diniatkan untuk menolong sesamanya. Selain itu disebutkan dalam ayat lain bahwa memberikan pinjaman yang baik akan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
- 3) Dihitung telah bersedekah. Karena orang yang memberi hutang dianggap telah menolong orang yang berhutang yaitu dengan cara meminjamkan benda atau hartanya kepada orang yang berhutang.
- 4) Menghilangkan kesukaran, siapapun umat muslim yang memberikan pinjaman dalam bentuk hutang piutang yang sifatnya baik dan menolong orang lain maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yakni dihilangkan kesukarannya.
- 5) Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan serta memiliki kebutuhan yang mendesak.⁷⁴

⁷⁴Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 157.

b. Dampak Negatif

- 1) Seseorang yang memiliki kebiasaan berhutang terlebih berhutang untuk sesuatu yang sia-sia, maka secara tidak langsung dapat merusak akhlak seseorang.
- 2) Orang yang berhutang apabila berkata ia berdusta apabila berjanji ia mengingkari, hal tersebut dilakukan manakala orang yang berhutang belum bisa membayar hutangnya atau sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya. Berikut bunyt hadistnya:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِذُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ⁷⁵

Dari Aisyah ra., ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw biasa berdoa dalam shalay, dan bacaanya: "Hai Tuhan! Sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau dari berbuat salah dan berhutang." Ada orang yang bertanya kepada beliau: kenapakah engkau amat banyak minta perlindungan daripada berhutang? Beliau menjawab: "orang yang berhutang bila berkata berdusta, bila berjanji tidak menepatinya." (Riwayat Imam Bukhari)

- 3) Hutang piutang dapat merusak tali silaturahmi antar orang yang berhutang, jika salah satu diantara orang yang berhutang terutama orang yang diberi hutang telah mengingkari perjanjian dalam hutang piutang tersebut. Maka terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berhutang mengenai pengembalian hutang dan

⁷⁵Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Jilid III Terjemahan....h. 22.

orang yang berhutang tidak mampu memenuhi permintaan orang yang memberi hutang maka penguasa atau hakim harus mencoba menengahi keduanya.

- 4) Membebani mental orang yang diberi hutang, karena pada dasarnya hutang piutang adalah hal yang menjadi tanggungan yang memiliki kewajiban harus dibayar secara lunas.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah suatu cara untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topic yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis atau suatu penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Masalah mengenai jual beli yang dilakukan dalam keadaan terdesak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya karna sering atau pernah dilakukan. Skripsi sebelumnya, pernah diteliti oleh:

1. Ainun Nadhifatul Machfudzoh, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, berjudul “Jual Beli Rumah di Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang Perspektif Fatwa Nomor 06/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Akad Istijna”. Dengan kesimpulan: Dalam hal jual beli rumah di Desa Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang belum semua point-point telah terimplementasikan dalam realitanya. Diantaranya yaitu dalam hal penentuan barang yang mana pada putusan ketika pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang, akan tetapi di dalam pelaksanaannya diperbolehkan dengan syarat harus tetap sesuai dengan perhitungan yang tertera sejak

awal akad. Dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akan tetapi oleh pihak De Prima tidak memperbolehkan adanya pembatalan akad yang solusinya yaitu apabila terdapat cacat pembeli dapat *complain* yang nantinya akan di perbaiki sesuai dengan pesanan yang ada dalam kesepakatan.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Sanestia Eriawati (2018) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Rumah Yang Belum Balik Nama Sertifikat dan Tanpa Akta Notaris PPAT ”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli rumah yang belum balik nama sertifikat dilakukan di wilayah perumnas wayhalim bandar lampung? Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang jual beli rumah yang belum balik nama sertifikat dan tanpa adanya akta notaris PPAT?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan di perumnas wayhalim Bandar lampung, penelitian bersifat deskriptif analisis komperatif. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dengan kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di perumnas wayhalim Bandar lampung khususnya Gg. Galunggung 4 hanya dilakukan pada pihak penjual dan pembeli tanpa adanya saksi dari pihak wilayah Gg rumah tersebut yang

ingin dijual. Dan dalam hukum islam jual beli rumah tersebut sah karna dalam jual beli trsebut sudah termasuk syarat dari jual beli menurut hukum islam yaitu perbuatan jual beli atas saling suka sama suka. Dalam hukum positif jual beli rumah tersebut belum sah, karena belum melakukan perbuatan hukum yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku Pasal 37 ayat 1 peraturan pemerintah No.24 tahun 1997, yang merupakan syarat formal sahnya jual beli rumah.



Daftar Pustaka

Buku:

- Ahmad, M. (2003). *Ekonomi Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar.
- al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aljaziri, A. (2001). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Pers.
- al-Zuhayli, W. (2008). *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- as-Sa'di, S. A. (2008). *Fiqh Jual beli Panduan Praktis Bisnis syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- dkk, G. D. (2007). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (1996). *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media.
- Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permata Net Publishing.
- Karim, A. A. (2015). *Riba, Ghoror dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karin, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2003). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenandamedia grup.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konsektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Priansah, B. A. (2014). *Menejemen Bisnis Syari'ah Menanamkan Nilai dan Praktik dalam Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

- Qudamah, A. M. (1997). *al-Mughni*. Riyadh: Dar al-Kutub.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riyadi, I. Y. (2015). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1997). *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saebani, A. H. (2015). *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia .
- Sjahbeini, S. R. (2015). *Perbankan Syari'ah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (n.d.).
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Mua'malah* . Jakarta: Rajawali Persada.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani.
- Tausikal, M. A. (2013). *Pandangan Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum Akad.

Jurnal

Efa Rodiah Nur,: Riba dan Ghoror: Suatu Tinjauan Hukum dan Etik dalam Transaksi Bisnis Modern” Al-‘Adalah, Vol. XII, No. 3, Juni 2015

Website

<https://almanhaj.or.id/3241-akad-bai-terpaksa.html>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Agus, pada tanggal 15 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Indra, pada tanggal 19 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Wawan, pada tanggal 21 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Riko, pada tanggal 28 Juli 2019

Wawancara dengan Bapak Salim, pada tanggal 2 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Anis, pada tanggal 7 Agustus 2019

